

Akuntabilitas dan Inklusivitas Dana Sosial Vihara Avalokitesvara di Madura: Perspektif PSAK 101

Moh. Hakamil ali¹, Moch Cholid Wardi²

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Madura

e-mail: ¹radhenz036@gmail.com , ²mochcholidwardi@gmail.com

ABSTRACT.

The role of houses of worship as drivers of social change through public funds has become increasingly crucial. Vihara Avalokitesvara in Madura presents a compelling case study; as a symbol of tolerance, it stands within a predominantly Muslim settlement in Polagan Village. This research aims to analyze the accountability and inclusivity of social funds at Vihara Avalokitesvara from the perspective of PSAK 101, while examining how leadership transitions have influenced social relations in Polagan Village. Although the management conducts routine monthly recording, these records remain restricted to internal use and lack transparency toward the public. This creates a gap between formal regulations (PSAK 101) and field practices. Utilizing a descriptive qualitative method, this study gathers data through in-depth interviews and physical field observations. The findings reveal that minimal transparency does not diminish the trust of the Polagan Village community. This phenomenon occurs because the community prioritizes tangible benefits such as road repairs and access to clean water over rigid administrative reports. Consequently, the researcher proposes the concept of "benefit-based accountability" as a primary finding. Furthermore, digitalization and a more formal, new leadership style actually risk distancing the emotional bond between the villagers and the Vihara management. This study concludes that personal integrity serves as a significantly stronger binding force than formal administrative procedures.

Keywords: *Benefit-based Accountability, Inclusivity, Transparency, Vihara Avalokitesvara*

ABSTRAK.

Peran tempat ibadah sebagai penggerak sosial melalui dana publik kini menjadi krusial. Vihara Avalokitesvara yang berada di Madura, memberikan kesan menarik. Sebagai simbol toleransi, Vihara Avalokitesvara berdiri tegak di tengah pemukiman mayoritas Muslim Madura, Tepatnya di Desa Polagan. Penelitian ini memiliki tujuan, untuk membedah bagaimana Akuntabilitas dan inklusivitas dana sosial pada Vihara Avalokitesvara di Madura, dalam perspektif PSAK 101. Serta melihat sejauh mana pergantian pimpinan Vihara Avalokitesvara mengubah relasi sosial di Desa Polagan. Pihak pengelola Vihara Avalokitesvara, sudah melakukan pencatatan rutin bulanan, tetapi hanya terbatas untuk kepentingan internal dan belum transparan kepada masyarakat. Ini menyebabkan adanya jarak antara aturan formal (PSAK 101) dengan praktik yang terjadi. Mengandalkan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data dari wawancara mendalam dan pengecekan fisik di lapangan. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa transparansi yang minim ternyata tidak meruntuhkan kepercayaan masyarakat Desa Polagan. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih terpaku pada manfaat nyata, seperti perbaikan jalan dan akses air bersih. Daripada terpaku pada laporan administratif yang kaku, peneliti menawarkan konsep "Akuntabilitas berbasis manfaat" sebagai temuan utama. Digitalisasi dan gaya kepemimpinan

baru yang lebih formal justru berisiko merenggangkan kedekatan emosional antara masyarakat Desa Polagan dan pengelola Vihara Avalokitesvara. Kesimpulan dalam penelitian ini, integritas personal di sini jauh lebih kuat daya ikatnya dibanding prosedur administratif formal

Kata kunci: Akuntabilitas Berbasis Manfaat, Inklusivitas, Transparansi, Vihara Avalokitesvara

PENDAHULUAN

Fungsi tempat ibadah saat ini tidak lagi hanya sebatas tempat ritual keagamaan, melainkan juga punya dampak besar terhadap kehidupan sosial di sekitarnya (Wiswadas et al., 2023). Tempat ibadah, sering kali menjadi penggerak dalam pembangunan fasilitas, baik fasilitas umum ataupun untuk kegiatan sosial lainnya. Karena melibatkan dana yang dikumpulkan dari publik, maka sistem pengelolaan dana tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan di kaji lebih dalam, terutama dalam hal pertanggungjawabannya.

Di pulau Madura, tepatnya di Desa Polagan, berdiri sebuah Vihara yang diyakini telah berdiri sejak lama. Keberadaan awal mula Vihara, di temukan oleh seorang petani lokal yang sedang mencangkul di sawah, petani tersebut menemukan sebuah patung (Arca) yang terpendam di dalam tanah pada abad ke-17 sekitar tahun 1600-an. Komunitas budhis dan masyarakat setempat membangun kelenteng kecil, lambat laun Vihara ini semakin berkembang sampai menjadi salah satu Vihara terbesar di Madura, sekarang yang kita kenal bernama "Vihara Avalokitesvara". Vihara ini menjadi simbol kerukunan umat beragama di Madura. Tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi umatnya, tetapi juga merangkul umat lain melalui keberadaan tiga tempat ibadah lainnya, di dalam satu komplek. yang terdiri dari Islam, Hindu, dan Konghucu. Pola interaksi sosial yang terbangun di sana, menunjukkan bahwa nilai toleransi yang kuat dapat menciptakan perdamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan (Rizal & Kharis, 2022; Rizal Maulana et al., 2025). Posisi vihara yang sudah lama berdiri ini menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Polagan yang mayoritas beragama Islam.

Dari pengamatan awal peneliti, dana sosial yang dikelola Vihara Avalokitesvara, berasal dari sumbangan sukarela para pengunjung wisata, donasi umat, dan donatur yayasan. Dana yang di dapat, digunakan oleh pengelola Vihara Avalokitesvara untuk kepentingan bersama. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggali lebih dalam bagaimana praktik akuntabilitas dan inklusivitas dana sosial pada Vihara Avalokitesvara ini dikelola. Terutama karena masih terdapat keterbatasan akses informasi publik. Secara teoritis, setiap pertanggungjawaban dana publik memerlukan sistem kendali yang baik untuk memastikan kualitas akuntabilitasnya tetap terjaga (Ahmad et al., 2024). Standar ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan antara pengelola dana dan pemangku kepentingan.

Hal ini sejalan dengan PSAK 101, yang menegaskan pengelola dana sosial wajib disajikan secara transparan dan akuntabel melalui informasi kepada publik.

Meskipun sistem pengelolaan Vihara Avalokitesvara telah bertransformasi ke arah digital (Excel) dan rutin di laporkan setiap bulan secara internal, namun transparansi informasi tersebut masih belum bisa diakses secara terbuka oleh publik. Uniknya, ketidak terbukaannya informasi ini tidak menimbulkan konflik atau protes dari masyarakat Desa Polagan. Masyarakat pada dasarnya tidak mengetahui secara detail bagaimana dana tersebut dikelola atau dilaporkan (Rahma & Yuningsih, 2022; Vierkant, 2026).

Penelitian sebelumnya membahas pengelolaan dana donasi pada Vihara Budhi Dharma, yang terletak di Medan, Sumatera utara. Hasil dari penelitian didalamnya menunjukkan bahwa dalam lembaga keagamaan masih menghadapi kendala serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Wijaya & Reonaldi, 2025). Temuan tersebut menjelaskan bahwa tanpa sistem yang kaku, dana sosial keagamaan berpotensi belum sepenuhnya inklusif. Sehingga belum mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara luas. Tapi yang terjadi di Vihara Avalokitesvara di Madura, meskipun sama-sama menghadapi kendala transparansi administratif, Vihara ini berhasil menciptakan inklusivitas yang ekstrem melalui pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat muslim di Desa Polagan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan laporan versi PSAK 101 tidak selamanya menghambat distribusi manfaat sosial.

Melihat kondisi ini, Peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi, mengenai praktik akuntabilitas dan inklusivitas dana sosial pada Vihara Avalokitesvara ini yang terjadi di desa polagan, mampu melampaui batas perbedaan agama melalui kontribusi nyata bagi masyarakat Muslim di sekitarnya, serta peran distribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Melalui penelitian ini, Peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model pertanggungjawaban dana sosial keagamaan, yang berbasis pada kepercayaan sosial dan nilai inklusivitas (Dzul et al., n.d.)

TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian (Wijaya & Reonaldi, 2025) Membahas tentang pengelolaan dana donasi Vihara Budhi Dharma yang berada di Medan. Dalam penelitiannya menemukan bahwa lembaga keagamaan masih menghadapi kendala serius dalam transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan potensi dana sosial keagamaan yang belum sepenuhnya inklusif karena ketiadaan sistem pelaporan formal. Akan tetapi, didalam penelitian tersebut tidak menjelaskan mekanisme kompensasi ketika transparansi administratif minim, sehingga gagal mengungkap bagaimana lembaga keagamaan dapat mempertahankan legitimasi sosial tanpa pelaporan formal PSAK 101.

Terdapat juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Windasari, 2024) di dalam penelitiannya juga menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. Hasil dari penelitiannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Penelitian ini memang relevan dalam pembahasannya, namun hanya terbatas pada konteks masjid, penelitiannya belum membahas terkait

dinamika lembaga lintas agama, yang melayani mayoritas Muslim, di mana logika akuntabilitas berbasis kepercayaan kultural mendominasi prosedur administratif yang kaku.

Akuntabilitas organisasi Buddha di Sumatera Selatan yang diteliti oleh (Wiswadas et al., 2023). Berhasil menemukan suatu keunikan bahwa transparansi juga dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, namun fokusnya pada penelitian yang dijalani, hanya terkait pengelolaan aset organisasi, bukan dana sosial public. Pendekatan kuantitatif mengabaikan perspektif penerima manfaat masyarakat luas dan dampak infrastruktur fisik sebagai "laporan pertanggungjawaban terbuka" yang dapat diverifikasi secara langsung.

Pada penelitian yang diteliti oleh (Ahmad et al., 2024) memang membangun fondasi teoritis PSAK 101 untuk dana publik. Tetapi ada celah di dalam penelitian tersebut. Teori yang digunakan belum diuji pada organisasi keagamaan minoritas yang berfungsi sebagai aktor sosial utama bagi komunitas mayoritas. Hal ini menghasilkan gap penelitian antara norma formal dan praktik kearifan lokal.

Keempat penelitian yang terdahulu di atas belum menjelaskan fenomena yang berbeda, di mana minimnya transparansi administratif tidak hanya bisa merusak kepercayaan publik, tetapi justru diimbangi dengan tingkat kepercayaan sosial yang sangat tinggi, seperti melalui akuntabilitas berbasis manfaat infrastruktur lintas agama seperti yang terdapat di Vihara Avalokitesvara. (Wijaya & Reonaldi, 2025) pada penelitiannya di Vihara Budhi Dharma Medan mengidentifikasi kendala serius transparansi sebagai hambatan utama inklusivitas dana sosial, tapi tidak menganalisis kasus ekstrem seperti Vihara Avalokitesvara, di mana masyarakat Desa Polagan yang mayoritas beragama Muslim, tetap mempertahankan kepercayaan yang pasti. Meskipun akses laporan keuangan tertutup. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Windasari, 2024) menekankan keterbukaan informasi formal dalam akuntansi Islam, sebagai prasyarat kepercayaan. (Ahmad et al., 2024) mewajibkan sistem kendali ketat PSAK 101 untuk dana publik, dan Wiswadas et al. (2023) menemukan korelasi transparansi dengan kinerja organisasi Buddha, tetapi penelitian keempatnya, gagal menangkap dinamika kearifan lokal yang berada di Madura. Di mana masyarakat melihat dan merasakan melalui manfaat nyata seperti perbaikan jalan desa, akses air bersih, dan lapangan olahraga multikultural berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas sosial yang mengungguli laporan keuangan formal.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Karena peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana praktik akuntabilitas dan inklusivitas dana sosial yang terjadi di lapangan (Bemme & Béhague, 2024; Husnullail & Dkk, 2024). Metode ini dipilih karena peneliti menghadapi hambatan dalam melakukan penelitian, yaitu tertutupnya akses data keuangan yang hanya boleh diketahui oleh pihak internal. Atas keterbatasan ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, dengan mencocokkan data hasil wawancara, observasi langsung, dan literatur yang ada (Malik et al., 2025).

Peneliti memilih lokasi Vihara Avalokitesvara karena mempunyai keunikan tersendiri, dimana tempatnya terletak di tengah-tengah pemukiman warga mayoritas Muslim di Madura. Yang berada di Desa Polagan, Galis, Pamekasan. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik yang unik, karena memiliki Praktik pengelolaan dana sosial yang menarik di teliti. juga sebagai tempat ibadah umat Budha minoritas, yang berada di tengah mayoritas muslim di Madhura.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 informan, yang terdiri dari admin keuangan (pihak internal), pihak yang terlibat dalam oprasional dana (satpam), serta masyarakat sekitar yang mengetahui praktik distribusi dana sosial tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada pihak yang terkait. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari informan, observasi dilakukan untuk mencocokkan data dan melengkapi data yang di peroleh. Hasil data yang telah di kumpulkan oleh peneliti, kemudian di analisis melalalui tahapan seleksi, penyajian dan penarikan kesimpulan(Romdona, 2021). Sehingga memperoleh hasil gambaran yang jelas mengenai praktik akuntabilitas dan inklusivitas dana sosial pada vihara Avalokitesvara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Berbasis Kepercayaan (Social Trust)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, Vihara Avalokitesvara saat ini, dikelola oleh “Yayasan Candi Bodhi Dharma”. Tahapan pengelolaan sistem pencatatan keuangan saat ini, sudah menggunakan sistem pencatatan berbasis semi digital (Excel) (Vierkant, 2026). Pengelolaan dana Vihara Avalokitesvara, banyak berasal dari pengunjung wisata dan donasi umat, baik berupa kotak donasi maupun transfer lewat media sosial. Langkah pencatatan berbasis semi digital ini, selain mengikuti perkembangan zaman, juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan manusia (human error). Temuan ini menjadi bukti bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana Vihara Avalokitesvara sudah meningkat. Juga bisa memastikan seluruh arus kas masuk, kas keluar dan saldo akhir terdokumentasi secara real-time. Integrasi dalam pengelolaan dana publik ini sejalan dengan argumen (Renanda & Rosidin, 2025). Yang menekankan, bahwa digitalisasi, merupakan instrumen krusial dalam menciptakan biokrasi yang efisien dan akurat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ayyub (Sebagai admin yayasan):

“Disini Proses pencatatannya sudah menggunakan digital (Excel), baik kas masuk, dan kas keluar, ada jumlah pengeluaran, jumlah pendapatan, dan juga jumlah saldo yang tersisa.”

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa seluruh arus kas telah terdokumentasi secara sistematis setiap bulannya. Pihak yayasan hanya bisa memberikan akses kepada pengurus yayasan dan pihak donatur tetap saja jika dipertanyakan. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan transparansi administratif dengan logika organisasi nirlaba yang seringkali memiliki struktur yang unik (Windasari, 2024). Fenomena yang terjadi, menjadi pembahasan

yang menarik dalam penelitian ini, karena adanya kesenjangan antara aturan transparansi pengelolaan keuangan, yang seharusnya terbuka untuk publik, dengan realita yang terjadi di lapangan (Ghoorah et al., 2025). Meskipun hal ini terjadi, Uniknya tingkat kepercayaan penduduk tetap sangat tinggi, meskipun akses informasi keuangannya terbatas. Jika kita melihat secara teori, keterbatasan akses informasi publik, sering kali dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tata kelola yang baik. Tetapi kenyataannya yang terjadi di Vihara Avalokitesvara menunjukkan hal yang berbeda, meskipun cara transparansinya bersifat tertutup, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Vihara Avalokitesvara ini, masih tetap berada pada level yang sangat tinggi.

Namun jika kita melihat dari perspektif PSAK 101, Vihara Avalokitesvara gagal dalam memenuhi standar secara administratif, karena laporannya hanya bersifat internal. Tetapi jika dilihat dari substansi, tujuan utama PSAK 101 yaitu kemanfaatan sosial, justru tercapai. Vihara melakukan Apa yang di perintahkan PSAK 101 (menyalurkan dana untuk infrastruktur seperti jalan dan hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar). Dalam kacamata Akuntansi Syariah dan etika politik, integritas pengelola seringkali menjadi variabel yang lebih dominan daripada sekadar laporan formal (Ahmad et al., 2024).

Hasil penelitian ini bisa memberikan penegasan, bahwa dalam konteks lembaga keagamaan, akuntabilitas tidak selamanya bisa diukur melalui keterbukaan informasi secara publik atau secara transparan. Sebaliknya, kepercayaan umat dan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan pemeliharaan fasilitas fisik. Kondisi seperti ini memperkuat teori bahwa dalam organisasi non-profit, esensi akuntabilitas terletak pada kekuatan kontrol internal dan integritas personal pengelolanya (Prमितasari et al., 2026). Maka dari kejadian ini, Vihara Avalokitesvara berhasil memberikan bukti bahwa sistem akuntabilitas berbasis kepercayaan tetap mampu menciptakan reputasi moral yang kuat di mata masyarakat Desa Polagan.



Gambar 1 Peneliti bersama Admin Keuangan yayasan, Vihara Avalokitesvara

Sumber: Dokumentasi Asli, 16 April 2026

Penelitian ini, berhasil menemukan nilai kebaruan sebuah keunikan yang dinamakan akuntabilitas berbasis manfaat (Islamiyati & Muhammad, 2025). Di mana,

di lingkungan berbasis organisasi keagamaan, ada sebuah ekspektasi yang tidak tertulis di masyarakat Desa Polagan, bahwa manfaat nyata lebih berharga dibandingkan sekadar kepatuhan administratif transparansi di atas kertas, masyarakat Desa Polagan, lebih mementingkan bukti nyata dari hasil yang bisa mereka lihat dan rasakan secara langsung manfaatnya. Fenomena yang terjadi, memberikan sebuah pesan penting bagi masa depan lembaga atau yayasan nirlaba, meskipun pencatatannya semi digital (Excel), teknologi hanya menjadi alat bantu semata. Pada akhirnya, fondasi utama yang menjaga kepercayaan publik tetaplah integritas personal para pengelolanya, yang menjadi narahubung, antara transparansi sistem dengan keyakinan sosial masyarakat.

Inklusivitas Lintas Agama: Distribusi Dana dan Dampak Infrastruktur

Vihara Avalokitesvara di Desa Polagan, dengan adanya tindakan sosial masyarakat, dan saling membantu sesama secara sukarela, memberikan contoh nyata bagi kita semua, bahwa nilai kemanusiaan mampu menembus dinding perbedaan keyakinan antaragama. Peneliti dalam proses pengumpulan data, menemukan sebuah fakta yang sangat menarik sekaligus menjadi temuan yang paling krusial dalam penelitian ini. Di mana, saat standar akuntansi modern menuntut supaya laporan keuangan bersifat administratif dan prosedural, masyarakat Desa polagan, justru malah memiliki standar tersendiri yang lebih jujur. Peneliti menyadari pemahaman warga Desa Poalagan, tentang dimana keterbukaan informasi telah melampaui standar akuntansi mana pun. Temuan ini di pertegas oleh pernyataan bapak Samad (Sebagai warga sekitar):

“Kami percaya sama vihara karena sejauh ini aman-aman saja... saya tidak perlu mengetahui (catatan keuangan) karena vihara bukan punya saya.”

Pernyataan tersebut adalah sebuah bukti bahwa bagi masyarakat Desa Polagan, integritas pengelola jauh lebih penting daripada hanya sebatas transparansi administratif di atas kertas. Kejadian seperti ini, sangat menarik untuk terus dikaji karena distribusi bantuan sosial Vihara Avalokitesvara yang terjadi, tidak hanya berjalan searah, tetapi Vihara Avalokitesvara menerapkan langkah distribusi yang bersifat inklusif, di mana yang terjadi, Vihara Avalokitesvara memanfaatkan dana sosial tersebut digunakan sebagian untuk kontribusi kepentingan masyarakat Desa Polagan yang mayoritas beragama Muslim. Praktik ini menunjukkan penerapan nilai nilai multikultural yang nyata dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama, selaras dengan yang dikaji (Nasution & Albina, 2024). Keberadaan Vihara Avalokitesvara di Desa Polagan tidak hanya berfungsi secara internal bagi umatnya saja, melainkan telah berubah menjadi aktor sosial yang memiliki dampak inklusivitas bagi masyarakat sekitarnya.

Ditengah masyarakat yang berbeda keyakinan keagamaan, pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, bisa menjadi salah satu akses yang bisa menghapus batas di antaraumat yang berbeda keyakinan, seperti Vihara Avalokitesvara yang menjadi tempat beribadah umat Budha, beraur bersama mayoritas umat beragama Islam di Desa Polagan. Sementara sarana olahraga yang di sediakan oleh Vihara

Avalokitesvara, seperti lapangan basket dan lapangan badminton, menjadi ruang publik netral di mana interaksi sosial antara umat beragama itu terjadi secara alami. Di Desa Polagan, identitas seperti suku dan status sosial bercampur menjadi satu dalam semangat kebersamaan. Perbedaan keyakinan, bukan membuat keduanya bermusuhan atau ada jarak diantara keyakinan yang berbeda, akan tetapi masyarakat Desa Polagan ini, membuat perbedaan menjadi suatu citarasa dan keunikan tersendiri, saling menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan Desa Polagan. Kesejahteraan sosial di wilayah multikultural hanya dapat dicapai melalui pengelolaan sumberdaya yang inklusif dan berbasis kearifan lokal (I Gede Made Yudi Antara, 2021)



Gambar 2 Fasilitas Jalan yang sering digunakan Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Asli, 16 April 2026

Keberadaan gambar fasilitas jalan yang sekarang menjadi akses keluar masuk warga Desa Polagan ini, adalah sebuah bukti bahwa dana sosial dari Vihara Avalokitesvara, sebagian digunakan untuk perbaikan jalan, meskipun sekarang kondisinya sudah mulai rusak, Tidak menutup kemungkinan nanti ada pembaruan kondisi jalan, mengingat dana sosial yang di kelola Vihara Avalokitesvara bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Polagan, ini menunjukkan bahwa inklusivitas yang dijalankan oleh pihak Vihara Avalokitesvara memang benar adanya. Pak Hari (sebagai Satpam) mengonfirmasi hal ini:

“Pernah juga vihara memperbaiki jalan desa, dan juga air bersih yang bisa bebas diambil oleh warga sekitar, juga ada tempat lapangan badminton dan lapangan basket.”

Situasi seperti ini, membuktikan bahwa kesejahteraan sosial di Desa Polagan, hanya dapat dicapai ketika akses terhadap fasilitas dijaga bersama-sama, sehingga setiap warga Desa Polagan merasa rukun dan tentram meskipun ada sisi perbedaan antar keyakinan umat beragama.

Peneliti memberikan argumen bahwa pola distribusi manfaat ini merupakan bentuk "Laporan Pertanggungjawaban Terbuka" yang paling efektif. Di saat laporan administratif versi PSAK 101 masih bersifat tertutup di internal, distribusi infrastruktur tampil sebagai bukti akuntabilitas yang bisa langsung "diaudit" oleh mata dan kulit masyarakat. Masyarakat tidak lagi menuntut transparansi angka di

atas kertas, karena mereka telah menerima transparansi dalam bentuk distribusi nyata di depan rumah mereka. Inilah yang peneliti sebut sebagai Akuntabilitas Berbasis Manfaat, di mana distribusi fisik jauh lebih sakti daripada sekadar publikasi saldo. Integritas pengelolaan dana sosial Vihara Avalokitesvara bagi masyarakat Desa Polagan, tidak bisa hanya diukur dari angka-angka laporan keuangan yang sangat rentan dimanipulasi, melainkan masyarakat Desa Polagan, melihat sejauh mana pengelolaan dapat dirasakan manfaatnya. Ini menunjukkan nilai-nilai etis dan regilius mampu menciptakan ikatan kepercayaan yang organik (Muqtadir¹ et al., 2025). Logika pemikiran Masyarakat yang sangat sederhana namun tajam. Dalam lingkup masyarakat Desa Polagan, manfaat yang bisa di rasakan adalah bahasa komunikasi yang paling efektif antara pihak pengelola dan penerima manfaat. Karena bagi masyarakat Desa Polagan, kepercayaan tidak lahir dari dokumen atau laporan yang kaku, melainkan dari konsistensi antara dana yang terkumpul dengan realita yang bisa dirasakan di lapangan.



Gambar 3 Musholla yang berdampingan dalam sat kompleks, Vihara Avalokitesvara

Sumber: Dokumentasi Asli, 16 April 2026

Puncak inklusivitas yang luar biasa dari perbedaan kepercayaan yang ada di Desa Polagan, kita bisa melihat dari adanya bangunan Ibadah umat Islam (Musholla) yang berada di dalam kompleks Vihara Avalokitesvara, namun bukan hanya itu, tetapi ada juga rumah ibadah umat lainnya, seperti Konghucu (kelenteng), Hindu (Pura). Ini membuktikan adanya toleransi tingkat tinggi antarumat beragama (Rahmat & Yahya, 2022). Penempatan rumah ibadah ini bukan hanya efisiensi tata ruang, tetapi juga menjadi sebuah bukti pernyataan keberanian mengenai kedewasaan beragama dan toleransi yang telah mendarah daging bagi masyarakat di Desa Polagan. Dengan adanya mushola yang berada dalam kompleks vihara ini memaksa terjadinya satu-kesatuan antara umat beragama. Logikanya, ketika seorang anak bermain dalam lingkungan yang berbeda keyakinan, sejak itu tertanam dalam dirinya rasa toleransi yang lambat laun akan tertanam kuat dalam jiwa masing-masing. Langkah ini merupakan manifestasi dari kepemimpinan yang berhasil membangun budaya kerukunan antara organisasi dan masyarakat lintas agama (Sirojuddin et al., 2025). Integritas sarana umum dan rumah ibadah lintas agama di dalam kompleks Vihara

Avalokitesvara di Desa Polagan ini, menciptakan ekosistem sosial yang sehat. Ini adalah sebuah bukti bahwa bangunan bukan hanya sebatas simbol, tetapi, bangunan yang bersifat kemanusiaan mampu merangkul keberagaman kepercayaan sebagai modal utama kemajuan. Desa Polagan ini, bisa di jadikan sebagai contoh nyata bagi masyarakat daerah lain, bahwa kerukunan dan harmoni dapat bersanding bersama, jika berlandaskan inklusivitas yang seperti ini diterapkan secara konsisten dalam setiap kebijakan.

Dinamika Transisi Kepemimpinan dan Implikasi Digitalisasi

Pergantian kepemimpinan dalam sebuah lembaga keagamaan, sudah lumrah terjadi. Akan tetapi ada yang meneruskan kebijakan terdahulu, ada juga yang membawa visi yang terbaru, ini dinamakan reformasi kepemimpinan. kepemimpinan bukan hanya sekadar berganti generasi, tetapi suatu proses perubahan, baik pola relasi maupun perilaku antara lembaga dengan masyarakat sekitar. Kepemimpinan dalam organisasi keagamaan memiliki tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara modernitas manajemen dan tradisi komunitas (Hamidah, 2025). Kondisi ini juga terjadi di Vihara Avalokitesvara di Desa Polagan. Dimana, yang terjadi di Vihara Avalokitesvara di Desa Polagan ini, memberikan gambaran nyata bagaimana gaya kepemimpinan secara mendalam mampu membuat perubahan pola interaksi sosial di tingkat masyarakat Desa Polagan.

Pada masa Kosala Mahinda (Pemimpin sebelumnya). Tata kelola Vihara Avalokitesvara di Desa Polagan, menunjukkan karakteristik pengelolaan yang bersifat terbuka. Kosala Mahinda, menggunakan gaya kepemimpinan yang mengedepankan kedekatan hubungan sosial pada masyarakat Desa Polagan. Dalam sudut pandang sosiologi, Kosala Mahinda, menjalankan kepemimpinan yang mengutamakan kepercayaan dan hubungan erat di antara masyarakat Desa Polagan. Vihara Avalokitesvara pada masa Kosala Mahinda, benar-benar berfungsi sebagai ruang publik, ruang berinteraksi antarumat beragama. Di mana masyarakat Desa Polagan, bisa keluar masuk komplek Vihara Avalokitesvara tanpa harus melapor meminta izin terlebih dahulu. Masyarakat Desa Polagan tidak hanya hadir sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif di Vihara Avalokitesvara. Kemudahan akses fisik dan seringnya interaksi tatap muka yang terjadi, menjadi fondasi utama dalam memelihara kerukunan antarumat. Kegiatan sosial yang dilakukan pada masa kepemimpinan Kosala Mahinda, Saat itu bukan hanya sekadar program kerja, melainkan manifestasi dari kepemimpinan yang memposisikan lembaga keagamaan sebagai sandaran bagi masyarakat di sekitar.

Pergeseran kepemimpinan dari Kosala Mahinda, yang mengedepankan kedekatan hubungan sosial dengan warga Desa Polagan, sekarang diganti oleh Dharma Junaidi (Putra Kosala Mahinda), Kepemimpinan Dharma Junaidi, mengedepankan modernisasi yang berbasis pada digitalisasi dan formalisasi organisasi. Temuan penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa Pak Hari (sebagai Satpam) merasakan perbedaan tersebut secara langsung:

“Kalo dulu ramai banyak pengunjung berdatangan, banyak acara besar digelar,

sekarang diganti (Dharma Junaidi) pengunjung makin sedikit... tidak boleh bebas keluar masuk tanpa seizin pengurus yayasan, meskipun warga sekitar."

Akses masyarakat Desa Polagan terhadap lingkungan Vihara Avalokitesvara, yang dulunya terbuka bebas, kini menjadi lebih terstruktur dan terbatas. Meskipun adanya digitalisasi di Vihara Avalokitesvara bertujuan untuk efisiensi dan struktural, pelaksanaan yang kaku, justru bisa menciptakan tembok pembatas antara hubungan kedekatan dengan warga Desa Polagan. Tahapan proses sosial yang sebelumnya dilakukan Kosala Mahinda, secara tidak langsung menciptakan keharmonisan. Dengan perubahan adanya digitalisasi saat ini, dapat mengikis aspek sentuhan manusia dalam bentuk pelayanan lembaga keagamaan. Keadaan Vihara Avalokitesvara yang seperti ini, mencerminkan transisi dari kepemimpinan Kosala Mahinda, yang bertujuan untuk komunitas, berubah menjadi organisasi yang sangat terkontrol, yang akan berdampak terhadap relasi sosial keagamaan.

Jika kita melihat dari sudut pandang yang terjadi di lapangan, fakta berkata, hubungan antara pihak Vihara Avalokitesvara dengan warga Desa Polagan, tetap berada dalam rasa saling menghormati dan saling menjaga toleransi antarumat beragama. Tetapi, melihat kebijakan yang terjadi saat ini, hubungan antarmanusia yang terjadi dilapangan, terdapat penurunan kualitas kedekatan. Masyarakat Desa Polagan, mulai memandang Vihara Avalokitesvara sebagai lembaga resmi yang mulai berjarak, bukan lagi sebagai bagian yang sangat penting bagi masyarakat Desa Polagan, Perubahan kebijakan gaya kepemimpinan seperti ini, memberikan pelajaran penting dalam studi kepemimpinan, bahwa efisiensi dalam manajerial tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas sosial. Gaya kepemimpinan yang terlalu fokus pada aspek administratif tanpa memperhatikan tradisi lokal bisa berisiko kehilangan kepercayaan dari masyarakat Desa Polagan.



Gambar 4 Vihara Avalokitesvara, yang menjadi objek penelitian

Sumber: Dokumentasi Asli, 16 April 2026

Hasil analisis penelitian dan data lapangan yang ada pada Vihara Valokitesvara, terindikasi adanya risiko penurunan kedekatan emosional yang bersifat alami, antara warga Desa Polagan dengan pihak pengelola Vihara Avalokitesvara. Secara teknis, digitalisasi yang di terapkan pada Vihara Avalokitesvara memang berhasil

meningkatkan efisiensi dalam administrasi, sesuai dengan pola manajemen modern. Tetapi, harus ada harga yang harus di bayar, yaitu turunnya hubungan kemanusiaan dalam lingkungan masyarakat Desa Polagan. Dalam perspektif sosiologis, terdapat ancaman menurunnya kedekatan yang dapat merenggangkan keterikatan sosial.

Efisiensi yang bersifat manajemen seperti ini, berisiko menurunkan fungsi kedekatan yang selama ini menjadi fondasi utama kerukunan antarumat beragama. Pelajaran penting dari transisi ini adalah bahwa pemberdayaan teknologi harus berjalan beriringan dengan literasi digital dan pemahaman terhadap konteks sosial lokal agar tidak terjadi keterasingan (G et al., 2025). Dengan kejadian ini, pengelola Vihara Avalokitesvara di Desa Polagan, seharusnya tidak boleh sepenuhnya bertumpu pada sistem yang seperti itu. Diperlukan upaya kesadaran bersama, untuk tetap saling merawat ruang lingkup sosial sebagai jembatan interaksi langsung. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digitalisasi di Vihara Avalokitesvara, tidak menghilangkan warisan toleransi yang sudah tertanam sejak dahulu, melainkan justru bisa memperkuat hubungan sosial yang telah ada, melalui penyesuaian antara teknologi dan kehangatan masyarakat di Desa Polagan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Vihara Avalokitesvara, adalah sebuah keuinkan di Desa Polagan, Galis, Pamekasan. Vihara ini, berdiri di tengah mayoritas muslim. Dalam penelitian ini, di temukan bahwa pencatatan keuangan, sudah menggunakan sistem digital (Excel). Tapi masih kurang dalam hal transparansi publik. Dari hasil wawancara dengan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat Desa Polagan, masih sangat tinggi meskipun transparansi terbatas. Ini terjadi di karenakan, masyarakat Desa Polagan lebih Menilai hasil yang dapat di rasakan secara langsung manfaatnya, tidak berpatokan pada angka-angka laporan keuangan, Ini menjadi pemikiran logika sederhana namun tajam. Hasil ini, di sebut oleh peneliti, sebagai “Akuntabilitas berbasis Manfaat.”

Pihak Pengelola Vihara Avalokitesvara, sangat menjunjung nilai akuntabilitas dan inklusivitas sosial dalam pengelolaannya. Terbukti dari pengelolaan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, akses fasilitas air bersih, dan lapangan olahraga. Hal ini telah di konfirmasi dari keterangan pihak yang terkait. Puncak inklusivitas sosial dari pengelolaan Vihara Avalokitesvara, yaitu, dengan ditemukan adanya tempat peribadatan umat Islam (Musholla) di dalam satu komplek.

Dalam transisi pergantian pemimpin baru, di temukan adanya penurunan kedekatan antara pihak pengelola dan masyarakat Desa Polagan. Vihara Avalokitesvara menjadi lebih formal dan sistematis. Ini menjadi keresahan, dikarenakan ada risiko yang bisa menurunkan kedekatan antarumat beragama. Secara teknis, digitalisasi yang di terapkan, memang berhasil meningkatkan efisiensi dalam administrasi, seperti pola manajemen modern, tapi ada penurunan tingkat kedekatan yang harus di korbakan. Penelitian ini mengajarkan perlunya kesadaran bersama, untuk tetap saling merawat dan menjaga keharmonisan ruang lingkup

sosial sebagai jembatan interaksi langsung antarumat beragama, melalui penyesuaian antara teknologi dan kehangatan masyarakat di Desa Polagan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, disarankan kepada pengelola pihak Vihara Avalokitesvara untuk tidak sepenuhnya bertumpu pada aturan atau kebijakan yang bersifat formal, melainkan memerlukan upaya kesadaran bersama, untuk tetap saling merawat ruang lingkup sosial sebagai jembatan interaksi langsung antarumat beragama. Menyesuaikan antara pemanfaatan teknologi pencatatan keuangan dengan kehangatan hubungan masyarakat Desa Polagan menjadi mutlak diperlukan, sehingga transformasi digitalisasi tidak menghilangkan warisan toleransi yang telah terjalin sejak lama, tetapi justru memperkuat hubungan sosial yang terjalin erat. Pendekatan yang menggabungkan efisiensi administrasi digital dengan akuntabilitas berbasis manfaat nyata seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum akan memastikan keberlanjutan model pengelolaan dana sosial yang inklusif dan berbasis kepercayaan sosial di Desa Polagan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Fai, A., & Faisal, A. (2024). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam Program Studi Hukum Tatanegara , Fakultas Syariah dan Hukum , terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun dalam proses pengambilan keputusan dan peny. (3), 64–77.*
- Bemme, D., & Béhague, D. (2024). Theorising the social in mental health research and action: a call for more inclusivity and accountability. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 59(3), 403–408. <https://doi.org/10.1007/s00127-024-02632-2>
- Dzul, M., Wal, D., Hafid, I., Azis, I., & Ghazalah, K. (n.d.). *The Role of Accountability and Amanah in Managing Community Social Funds in the Sedekah Jumat Program of the MAHTAN (Masyarakat Hijrah Tanpa Nama) Community. 2(1), 1146–1152.*
- G, F. V., Universitas, P., & Makassar, H. (2025). *Keluarga 5.0: dinamika penggunaan teknologi dalam relasi sosial keluarga modern. 5(Desember), 88–97.*
- Ghoorah, U., Mariyani-Squire, E., & Zoha Amin, S. (2025). Relationships between financial transparency, trust, and performance: an examination of donors' perceptions. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04640-2>
- Hamidah, A. (2025). Kepemimpinan Kyai Di Tengah Badai Modernitas: Antara Otoritas Kharismatik Dan Tata Kelola Profesional. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 121–136. <https://doi.org/10.53398/alamin.v3i1.438>
- Husnullail, M., & Dkk. (2024). Teknik Pemeriksaan Data Dalam Riset Ilmiah. *Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- I Gede Made Yudi Antara. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)*, 4(2), 112–121.

<https://doi.org/10.22146/jsikti.xxxx>

- Islamiyati, N. N., & Muhammad, A. (2025). *Analysis of Financial Report Transformation in Improving the Quality of Financial Report Information Hajj Tenry Digital Printing*. 8(1), 113–118.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 33–41. <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue1page33-41>
- Muqtadir¹, A., Saputra², R., & Hariry³, S. (2025). Pengaruh Kepercayaan Agama terhadap Perilaku Sosial dan Moral Individu. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 634–642.
- Nasution, R., & Albina, M. (2024). Membangun Kesatuan dalam Keanekaragaman Multicultural Education. *SCHOLARS: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Pendidikan Multikultural*, 2(2), 164–173. <https://doi.org/10.31959/js.v2i2.2781>
- Pramitasari, D. A., Hasanah, A., Syafii, M., & Ulum, B. (2026). *Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23 di Lembaga Nirlaba atau Organisasi Sosial yang Menggunakan Jasa Outsourcing Berkaitan dengan ISAK No 35*. 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.54259/akua.v5i1.6414>
- Rahma, N. M., & Yuningsih, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Keuangan Masjid Nurul Huda Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(2), 131–140.
- Rahmat, M., & Yahya, M. W. B. H. M. (2022). The Impact of Inclusive Islamic Education Teaching Materials Model on Religious Tolerance of Indonesian Students. *International Journal of Instruction*, 15(1), 347–364. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15120a>
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1651–1657. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.310>
- Rizal, D. A., & Kharis, A. (2022). Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9182, 34–52.
- Rizal Maulana, Abdul Sahal Madani, Annisa Zahira, Arif Purnama, Difa Maulana, Fahmi Abdillah, & Fairuz Zahira. (2025). Pengaruh Toleransi terhadap Interaksi Sosial dalam Mewujudkan Perdamaian di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(1), 256–265. <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i1.5286>
- Romdona, J. (2021). Teknik Pengumpulan Data Kualitatif. *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Sirojuddin, A. S., Bramayudha, A., & Novitasari, N. L. (2025). Peran Kepemimpinan

- dalam Membangun Budaya Kerukunan Antara Organisasi dan Masyarakat: Studi kasus K3TA (Kerukunan Keluarga Kalimantan Tulungagung). *Journal of Islamic Management*, 5(2), 134–148. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.2049>
- Vierkant, T. (2026). Does Accountability Require Agency? Comment on Responsibility and Accountability in the Algorithmic Society. *Philosophy and Technology*, 39(1), 1–6. <https://doi.org/10.1007/s13347-025-01014-z>
- Wijaya, H., & Reonaldi, C. C. (2025). *DHARMA*. 3(1), 155–161.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>
- Wiswadas, W., Sobri, K. M., Alfatih, A., & Alamsyah, A. (2023). Accountability, Transparency, and Employee Performance in Organizational Asset Management in Buddhist Religious Organizations: Evidence from the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sumatra Province. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 11(1), 49–58. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v11i1.9251>